



SALINAN

## WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip, perlu menetapkan klasifikasi arsip dengan menggunakan sistem pengkodean;
- b. bahwa untuk untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 43 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintahan Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);
  6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 115);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

### BAB II KLASIFIKASI ARSIP

#### Pasal 2

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka pengelolaan arsip dinamis.

#### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. fungsi fasilitatif; dan
- b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jenis arsip yang dipergunakan untuk aktivitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah meliputi umum, pengawasan, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenis arsip yang dipergunakan untuk aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan sistem pengkodean angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. tanda pengenal aktivitas sesuai fungsi fasilitatif atau fungsi substantif arsip; dan
  - b. dasar pemberkasan dan penataan arsip.
- (3) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 000 : Umum
  - b. 100 : Pemerintahan
  - c. 200 : Politik
  - d. 300 : Keamanan dan Ketertiban
  - e. 400 : Kesejahteraan
  - f. 500 : Perekonomian
  - g. 600 : Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
  - h. 700 : Pengawasan
  - i. 800 : Kepegawaian
  - j. 900 : Keuangan
- (4) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf h, huruf i dan huruf j dipergunakan untuk arsip dengan fungsi fasilitatif.
- (5) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dipergunakan untuk arsip dengan fungsi substantif.

#### Pasal 5

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat kode klasifikasi, judul pokok masalah, sub masalah, dan sub-submasalah.
- (2) Ketentuan mengenai Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyusunan Klasifikasi Arsip berdasarkan klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyusunan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat atau unit kerja kearsipan.

BAB III  
PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Klasifikasi Arsip meliputi:
  - a. pelaksanaan pendampingan, sosialisasi dan publikasi;
  - b. pelaksanaan pelatihan teknis kepada petugas kearsipan;  
dan
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 43 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 10 Februari 2022

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 10 Februari 2022

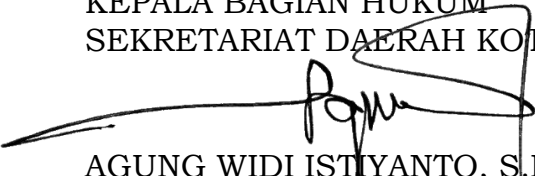
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

  
AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

<b>000</b>	<b>UMUM</b>
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
001.4	Bandir/Umbul-umbul
002	Tanda kehormatan/penghargaan ( khusus untuk Non PNS)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Penghargaan secara adat
002.5	Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dsb)
003	Hari Raya/Besar
003.1	Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dsb)
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun/HUT (Hari jadi Provinsi/Kab/Kota)
004	Ucapan
004.1	Terima kasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon diri
004.4	Bela sungkawa
004.5	Ucapan lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Pejabat lainnya
<b>010</b>	<b>URUSAN DALAM</b>
011	Gedung kantor, termasuk instalasi
011.1	Listrik
011.2	Telepon
011.3	Otomasi
011.4	Air Minum
011.5	Hidrant
011.6	Alarm
011.7	Internet
012	Rumah Dinas
013	Akomodasi/Persinggahan (mess/wisma/hotel)
014	Rumah susun/apartemen
015	Peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, laptop dll)
016	Pengurusan kendaraan dinas
017	Keamanan/ketertiban kantor
018	Kebersihan kantor
019	Protokol
019.1	Upacara bendera
019.2	Tata tempat
019.21	Pemasangan gambar Presiden/Wakil Presiden
019.3	Audiensi
019.4	Penerimaan Tamu
019.5	Kerjasama
<b>020</b>	<b>BARANG DAN JASA</b>
<b>021</b>	Penawaran

021.1	Penawaran barang
021.2	Penawaran jasa
022	Barang
022.1	Barang bergerak
022.2	Barang tidak bergerak
023	Jasa
027	Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukan, lelang.
027.1	Prakualifikasi, pasca kualifikasi rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan/anwijzing, negoisasi, evaluasi
027.2	SPK,Kontrak/Amandemen/Addendum, Teguran
027.3	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
027.4	Serah terima pekerjaan
027.5	Pemeriksaan pekerjaan
027.6	Perpanjangan waktu/force majore
027.7	Denda
027.8	Sanggahan
027.9	Pemeliharaan barang/jasa
028	Inventaris
028.1	Pendataan Barang Milik Negara
028.2	Pemeliharaan Barang Milik Negara
028.3	Penghapusan Barang Milik Negara
<b>030</b>	<b>KEKAYAAN DAERAH</b>
031	Barang-Barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)
032	Barang-Barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen /bangunan bersejarah dll)
033	Tanaman
034	Alat-Alat Berat
035	Hewan
036	Barang Persediaan Dalam Gudang
037	Alat Pengangkut (Darat, Laut, Udara)
038	Peralatan Pabrik, Laboratorium
039	Peralatan Kesehatan/Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)
<b>040</b>	<b>PERPUSTAKAAN/DOKUMEN/KEARSIPAN/SANDI</b>
<b>041</b>	<b>Perpustakaan</b>
041.1	Pameran Bahan Perpustakaan
041.2	Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
041.3	Sirkulasi/layanan
041.31	Keanggotaan
041.32	Peminjaman dan pengembalian
041.4	Deposit
041.5	Pemeliharaan, Pelestarian/alih media
041.6	Pembinaan Perpustakaan
041.61	Bantuan buku, rak
041.7	Penghapusan/penyusutan bahan perpustakaan
041.8	Jenis-jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
041.9	Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan
041.10	Teknologi Informasi dan Komunikasi Perpustakaan
042	Dokumentasi
045	Kearsipan
045.1	Pola Klasifikasi
045.2	Akuisisi Arsip
045.3	Penyusutan Arsip
045.31	Jadwal Retensi Arsip
045.32	Penilaian Arsip
045.33	Pemindahan Arsip
045.34	Penyerahan Arsip
045.35	Pemusnahan Arsip
045.4	Pembinaan Kearsipan
045.41	Pengawasan

045.42	Bimbingan Kearsipan
045.5	Pemeliharaan, Pelestarian/Konservasi Arsip
045.51	Fumigasi dan Termit Control
045.52	Laminasi
045.53	Alih Media
045.6	Layanan
045.7	Pemasyarakatan
045.71	Pameran
045.72	Penerbitan Naskah Sumber Arsip
045.73	Sosialisasi Kearsipan
045.8	Pengembangan Sistem
045.81	Sistem Kearsipan
045.82	Sistem Jaringan Informasi Kearsipan
046	Sandi
047	Telegram, Telex, Radio, ISB
048	Data Elektrolis
<b>050</b>	<b>PERENCANAAN DAN EVALUASI</b> meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus antar Kementerian, Musrenbangnas, Musrenbangdes
050.1	RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
050.11	RENSTRA (Rencana Strategi)
050.12	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah)
050.13	RENSTRA BAPPEDA
050.2	Program Nasional
050.21	RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
050.22	RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga)
050.23	RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
050.24	Rencana Kerja Perangkat Daerah
050.25	KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)
050.26	Jawaban Walikota atas pandangan fraksi
050.27	Nota keuangan
050.28	RKT (Rencana Kerja Tahunan)
050.29	RKO (Rencana Kerja Operasional)
051	Laporan
051.1	Laporan berkala
051.2	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP, LPPD, LKPJ, LK,...)
052	Evaluasi
052.1	Evaluasi Rencana Strategis
052.11	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
052.12	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
052.13	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
052.14	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
<b>060</b>	<b>ORGANISASI/KETATALAKSANAAN</b>
061	Organisasi
061.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
061.2	Tata tertib kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai
062	Organisasi Badan Non Pemerintah
063	Organisasi Badan Internasional
064	Organisasi semi pemerintah
065	Ketatalaksanaan
065.1	Tata Naskah Dinas
065.2	Stempel dinas dan stempel jabatan
065.3	Papan nama instansi pemerintah/non pemerintah
065.4	Alamat-alamat kantor dan pejabat
065.5	Ketentuan pakaian dinas dan atribut
066	Tata Hubungan Kerja

067	Standart Operasional Prosedur
068	Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
069	Analisis Jabatan
069.1	Pengukuran/Penilaian beban kerja Jabatan Sruktural dan Fungsional
069.2	Uraian Jabatan
<b>070</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>
071	Riset meliputi perijinan bagi peneliti, data penelitian, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
072	Pengembangan
072.1	Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)
072.2	SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
072.3	SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi cluster, Kab/Kota, desa inovatif
072.4	Inkubator Tehnologi dan Bisnis
072.5	Pameran produk inovasi/Ristek
072.6	BTC (Bisnis Teknologi Center)
072.7	Raptek (Penerapan Iptek)
072.8	HKI (Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual)
073	Kajian
073.1	Kajian strategis/diskusi/Forum Group Discussion (FGD)
073.2	Seminar
073.3	Workshop
073.4	Rapat Koordinasi/Rapat Teknis
073.5	Lokakarya
073.6	Diseminasi/sosialisasi hasil penelitian
074	Kerjasama Penelitian
074.1	Instansi Pemerintah Pusat/Daerah
074.2	Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
074.3	Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
074.4	Lembaga Internasional
075	Perekayasaan
076	Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
077	Publikasi Ilmiah
077.1	Jurnal Ilmiah
<b>080</b>	<b>KONPERENSI/RAPAT KOORDINASI</b>
081	Gubernur
082	Walikota
083	Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan Perangkat Daerah)
084	Instansi lainnya
085	International di dalam negeri
086	International di luar negeri
<b>090</b>	<b>PERJALANAN DINAS</b>
<b>091</b>	Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah
<b>092</b>	Perjalanan Menteri Ke Daerah
<b>093</b>	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
<b>094</b>	Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas(SPT) dan Surat Tugas
<b>095</b>	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
<b>096</b>	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
<b>097</b>	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
<b>100</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>
<b>110</b>	<b>PEMERINTAHAN PUSAT</b>
111	Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.
111.1	Pertanggung jawaban Presiden kepada MPR
111.2	Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan
112	Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.
113	Susunan Kabinet
113.1	Reshuffle



113.2	Penunjukan Menteri ad Intern
1133	Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1
114	Kementerian Dalam Negeri
114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri
115	Kementerian lainnya
116	Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
117	Lembaga Non Kementerian
118	Otonomi Daerah
119	Kerjasama antar Kementerian
<b>120</b>	<b>PEMERINTAH PROVINSI</b>
120.01	Kebijakan Pemerintah Provinsi
120.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
120.03	Monografi, tambahkan kode wilayah
120.1	Koordinasi
120.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah
120.12	Instansi Vertikal
120.13	Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri
121	Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
122	Wakil Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
123	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan
124	Badan-badan Pertimbangan Daerah, meliputi Muspida
125	Pembentukan/Pemekaran
125.1	Pembentukan Daerah Otonom
125.2	Pembentukan Wilayah
125.3	Perubahan Batas Wilayah
125.4	Pemekaran Wilayah
125.5	Permasalahan Batas Wilayah
125.6	Pemindahan Ibukota Provinsi
125.7	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan Urusan
<b>130</b>	<b>PEMERINTAH KOTA</b>
130.01	Kebijakan Pemerintah Kota
130.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ)
130.03	Monografi
130.04	Koordinasi
130.05	Perangkat Daerah
130.06	Instansi Vertikal
130.07	Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri (Sister City)
131	Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
132	Wakil Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
133	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, meliputi Forkompinda
135	Pembentukan Daerah
135.1	Pembentukan Daerah Otonom
135.2	Pembentukan Wilayah
135.3	Perubahan Batas Wilayah
135.4	Pemekaran Wilayah
135.5	Permasalahan Batas Wilayah
135.6	Pemindahan Ibukota Kota
135.7	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
136	Pembagian Wilayah
137	Penyerahan Urusan

138	Pemerintahan Wilayah Kecamatan
138.1	Pembentukan Kecamatan
138.2	Pemekaran Kecamatan
138.3	Perluasan/perubahan batas wilayah Kecamatan
138.4	Pemindahan Ibu Kota Kecamatan
138.5	Laporan Kecamatan
<b>140</b>	<b>PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN</b>
141	Perangkat Kelurahan meliputi pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dsb
142	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan
143	Kekayaan Desa / Kelurahan : Bando Kelurahan, Tanah bengkok dll
144	Lembaga Tingkat Kelurahan : Rembug , Badan Permusyawaratan , LPMK
145	Administrasi Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll
146	Kewilayahan
146.1	Pembentukan Kelurahan
146.2	Pemekaran Kelurahan
146.3	Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah Kelurahan
146.4	Perubahan nama Kelurahan
146.5	Permasalahan Batas Kelurahan
146.6	Penyatuan Kelurahan
146.7	Penghapusan Kelurahan
147	RT-RW
<b>150</b>	<b>LEGISLATIF MPR/DPR/DPD</b>
151	Keanggotaan MPR
151.1	Pencalonan
151.2	Pengangkatan dan pengambilan Sumpah
151.3	Pemberhentian
151.31	Recall
151.32	Meninggal
151.4	Pelanggaran
151.5	Pergantian Antar Waktu
152	Keanggotaan DPR
152.1	Pencalonan
152.2	Pengangkatan dan pengambilan Sumpah
152.3	Pemberhentian
152.31	Recall
152.32	Meninggal
152.4	Pelanggaran
152.5	Pergantian Antar Waktu
153	Keanggotaan DPD
153.1	Pencalonan
153.2	Pengangkatan dan pengambilan Sumpah
154	Persidangan
155	Kesejahteraan
155.1	Keuangan
155.2	Penghargaan
156	Hak
157	Jawaban Pemerintah
158	Peninjauan/Kunjungan Lapangan
159	Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
<b>160</b>	<b>DPRD PROVINSI</b>
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah
161.3	Pelanggaran
161.4	Pemberhentian Antar Waktu
161.41	Meninggal Dunia
161.42	Mengundurkan Diri

161.43	Diberhentikan
161.5	Alat Kelengkapan Dewan
161.51	Pimpinan
161.52	Badan Musyawarah
161.53	Komisi
161.54	Badan Legislasi Daerah
161.55	Badan Anggaran
161.56	Badan Kehormatan
161.57	Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
162	Persidangan
162.1	Rapat-Rapat
162.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
162.12	Rapat Pimpinan DPRD
162.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
162.14	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
162.15	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
162.16	Rapat Fraksi
162.2	Fraksi
162.3	Tata Tertib
162.4	Kode Etik
162.5	Reses
162.6	Peninjauan/Kunjungan Lapangan
162.7	Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
<b>170</b>	<b>DPRD KOTA</b>
171	Keanggotaan
171.1	Pencalonan
171.2	Pengangkatan dan pengambilan sumpah
171.3	Pelanggaran
171.4	Pemberhentian Antar Waktu
171.41	Meninggal Dunia
171.42	Mengundurkan Diri
171.43	Diberhentikan
171.5	Alat Kelengkapan Dewan
171.51	Pimpinan
171.52	Badan Musyawarah
171.53	Komisi
171.54	Badan Legislasi Daerah
171.55	Badan Anggaran
171.56	Badan Kehormatan
171.57	Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
172	Persidangan
172.1	Rapat-Rapat
172.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
172.12	Rapat Pimpinan DPRD
172.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
172.14	Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
172.15	Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
172.16	Rapat Fraksi
172.2	Fraksi
172.3	Tata Tertib

172.4	Kode Etik
172.5	Reses
172.6	Peninjauan/Kunjungan Lapangan
172.7	Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
173	Kesejahteraan
173.1	Keuangan
173.2	Penghargaan
174	Hak
<b>180</b>	<b>HUKUM</b>
180.1	Konstitusi
180.11	Dasar Negara
180.12	Undang Undang Dasar
180.13	Undang Undang
180.14	Peraturan Pemerintah
180.15	Keppres/Perpres/Inpres
180.16	Kepmen/Permen/Inmen
180.17	Perundangan Tingkat Provinsi meliputi Perda, Kepgub/Pergub/Ingub
180.18	Perundangan Tingkat Kota meliputi Perda, KepWal, PerWal
180.19	Perundangan Tingkat Kelurahan meliputi Peraturan Kelurahan, Keputusan Lurah
180.2	Tap MPR
180.3	Konvensi
181	Perdata
181.1	Tanah
181.2	Rumah
181.3	Utang/Piutang
181.31	Gadai
181.32	Hipotik
181.4	Notariat
182	Pidana
182.1	Tindak Pidana Umum
182.2	Tindak Pidana Khusus
183	Peradilan
183.1	Jenis-jenis Peradilan
183.11	Peradilan Umum
183.111	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
183.112	Peradilan Tinggi
183.113	Mahkamah Agung
183.12	Peradilan Agama Islam
183.121	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
183.122	Pengadilan Tinggi Agama Islam
183.123	Mahkamah Islam Agung
183.13	Peradilan Militer
183.131	Mahkamah Militer Tingkat Pertama
183.132	Mahkamah Militer Tinggi
183.133	Mahkamah Militer Agung
183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
183.141	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.142	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183.143	Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
183.15	Peradilan Tindak Pidana Korupsi
183.16	Peradilan Hak Asasi Manusia
183.17	Mahkamah Konstitusi
183.18	Komisi Yudisial
183.19	Ombustmen
183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi

183.23	Derden Verset
183.24	Peninjauan Kembali
183.25	Grasi, Amnesti, Abolisi
183.3	Eksekusi
183.4	Pembinaan hukum, meliputi Kadarkum
183.5	Bantuan Hukum, meliputi LBH
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
185.1	Visa
185.2	Paspor
185.3	Exit
185.4	Reentry
185.5	Lintas Batas/Batas Antar Negara
186	Kepenjaraan
186.1	Registrasi narapidana
186.2	Pembinaan narapidana
186.3	Pembebasan narapidana
186.4	Tahanan titipan
187	Kejaksaan
187.1	Penuntutan Umum
187.2	Penuntutan Khusus
188	Hukum Adat
<b>190</b>	<b>HUBUNGAN LUAR NEGERI</b>
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama Diplomatik dengan Negara Asing
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
<b>200</b>	<b>POLITIK</b>
201	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
201.1	Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara
201.2	Kesatuan Bangsa
201.3	Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk laporannya
201.4	Keadaan Politik Luar Negeri
201.5	Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan ipoleksosbud hankam
201.6	Orde Baru(orde lama)
201.7	Orde Reformasi
<b>210</b>	<b>KEPARTAIAN</b>
211	Partai Politik
211.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
211.2	Program Kerja, data kegiatan PARPOL
211.3	Pembinaan PARPOL
211.4	Hasil Munas/Musda PARPOL
211.5	Struktur/Kepengurusan, pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL
211.6	Data inventaris dan keuangan PARPOL
212	Partai/Organisasi Terlarang
212.1	Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang
212.2	Daftar dan data pengurus anggota partai/organisasi terlarang
212.3	Ijin Meninggalkan tempat/domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang
212.4	Daftar berkala mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang
212.5	Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang
<b>220</b>	<b>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
221	Pembentukan organisasi
221.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
221.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
221.3	Program Kerja organisasi
221.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota

222	Pembinaan organisasi
222.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
222.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
<b>230</b>	<b>ORGANISASI PROFESI DAN FUNSIONAL</b>
231	Pembentukan organisasi
231.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
231.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
231.3	Program kerja organisasi
231.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
232	Pembinaan organisasi
232.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
232.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
<b>240</b>	<b>ORGANISASI PEMUDA</b>
241	Pembentukan organisasi
241.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
241.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
241.3	Program kerja organisasi
241.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
242	Pembinaan organisasi
242.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
242.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
<b>250</b>	<b>ORGANISASI BURUH DAN TANI</b>
251	Pembentukan organisasi
251.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
251.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
251.3	Program kerja organisasi
251.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
252	Pembinaan organisasi
252.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
252.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
<b>260</b>	<b>ORGANISASI WANITA</b>
261	Pembentukan organisasi
261.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
261.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
261.3	Program kerja organisasi
261.4	Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota
262	Pembinaan organisasi
262.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
262.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
<b>270</b>	<b>PEMILU (PEMILIHAN UMUM), PILKADA (PEMILIHAN KEPALA DAERAH)</b>
271	Pencalonan
272	Nomor Urut/Tanda Gambar
273	Kampanye
273.1	Dana Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih/Daftar Pemilih
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Suara
277	Pemungutan Suara/Penghitungan Suara
278	Hasil Pemilu
278.1	Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif
278.2	Penetapan pemenang pilkada
279	KPU/KPUD
<b>280</b>	<b>PENGAWASAN PEMILU/PILKADA</b>
281	Pemantauan

282	Pelanggaran
283	Sengketa
284	Panwaslu
<b>300</b>	<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
300.1	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
300.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan/ketertiban umum
300.4	Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
301	Koordinasi dan Kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
302	Pengawasan Trantibum
303	Penegakan Pelaksanaan Perda
304	Pembinaan/Penyuluhan pelanggaran Perda
305	Patroli Wilayah
306	Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing
306.1	Pengamanan
306.2	Pengawalan
307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
<b>310</b>	<b>PERTAHANAN</b>
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Ketahanan Bangsa
315	Ketahanan Ekonomi
316	Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
<b>320</b>	<b>KEMILITERAN/TNI</b>
321	Latihan Militer
322	Wajib Militer
323	Operasi Militer
324	Kekayaan TNI
325	Kemanunggalan TNI dengan rakyat (TMMD)
<b>330</b>	<b>KEAMANAN</b>
331	Kepolisian
331.1	Polisi Pamong Praja
332	Huru-hara/Demonstrasi
333	Senjata Api/Tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat-surat kaleng
337	Pengaduan Masyarakat
338	Himbauan atau Larangan
<b>340</b>	<b>PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)</b>
340.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
341	Pembinaan dan Diklat
341.1	Pengangkatan/pemberhentian anggota Linmas
341.2	Pendidikan/latihan Linmas
341.3	Pelatihan PAM Swakarsa
341.4	Pendidikan/latihan MENWA
342	Pengerahan dan pengendalian Linmas
343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas
343.1	Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas
343.2	Bantuan Modal Usaha bagi anggota Linmas
343.3	Santunan uang duka bagi anggota Linmas
343.4	Penghargaan bagi anggota Linmas
344	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa
344.1	Linmas Lanjut Usia
345	Orientasi Kesadaran Bela Negara

346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas
<b>350</b>	<b>KEJAHATAN</b>
351	Makar/Pemberontakan/Terrorisme
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan/Pencurian/Perampasan
354	Subversi/Penyeludupan/Narkotika
355	Penipuan dan Pemalsuan
356	Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan
357	Kekerasan pada perempuan dan anak
357.1	Pelaporan
357.2	Penanganan korban
358	Kenakalan
359	Kejahatan lainnya (trafficking, hipnotis, dll)
<b>360</b>	<b>BENCANA</b>
360.1	Pelatihan
360.2	Surat Keputusan
360.3	Berita Acara
361	Gunung Berapi/Gempa/Tsunami
362	Banjir/Tanah Longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
365	Kekeringan
366	Posko Bencana
367	Koordinasi/Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
368	MOU Pemerintah Pusat BNPB
<b>370</b>	<b>KECELAKAAN</b>
371	Latihan SAR
372	Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam
373	Pelatihan manajemen bagi pejabat
374	Satkorlak dan Satlak PBP
375	Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
376	Latihan ketrampilan pemadam kebakaran
377	Kecelakaan Darat, Air dan Udara
378	Investigasi/penyelidikan kecelakaan
379	Asuransi Kecelakaan
<b>380</b>	<b>PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b>
381	Perencanaan
381.1	Perencanaan teknis
381.2	Rekomendasi
382	Bantuan Bencana
383	Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
384	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
385	PUSDALOPS
386	Kunjungan lapangan
387	Relawan
388	Laporan Bencana
<b>390</b>	<b>KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN</b>
391	Instansi pemerintah Pusat
392	Instansi pemerintah di daerah
393	Lembaga International
394	Lembaga non pemerintah nasional
<b>400</b>	<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
401	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
<b>410</b>	<b>PEMBANGUNAN KELURAHAN</b>
411	Gotong-royong
411.1	Swadaya gotong royong
411.11	Pembinaan
411.12	Pungutan



411.2	Lembaga Sosial Kelurahan
411.3	Latihan kerja masyarakat
411.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
411.5	Penyuluhan Masyarakat
411.6	Kelembagaan
411.7	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
412	Perekonomian Kelurahan
412.1	Produksi Kelurahan
412.11	Pengolahan
412.12	Pemasaran
412.2	Pembiayaan Pembangunan Kelurahan
412.21	Inventarisasi Data
412.22	Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
412.23	Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
412.24	Bantuan/Stimulasi
412.25	Perkreditan Kelurahan
412.26	Pelaporan
412.27	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MP)
412.3	Koperasi Kelurahan
412.31	Badan Usaha Unit Kelurahan
412.32	Koperasi Unit Desa (KUD)
413	Sarana dan Prasarana Kelurahan
413.1	Pemukiman kembali penduduk
413.2	Pemugaran perumahan dan lingkungan Kelurahan
413.3	Perbaikan Kampung
413.4	Teknologi Tepat Guna (TTG)
414	Pengembangan Kelurahan
414.1	Perlombaan Kelurahan
414.11	Pedoman
414.12	Penilaian
414.13	Kejuaraan
415	Koordinasi
415.1	Kerjasama
414.11	Luar Negeri
415.12	Perguruan tinggi
415.13	Kementerian/Lembaga Pemerintah
415.14	Lembaga lainnya
<b>420</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
420.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan
420.2	Pendidikan Karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb
420.3	Pendidikan Kemasyarakatan
421	Sekolah (termasuk akreditasi)
421.1	Pra sekolah (PAUD, Playgroup)
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah( SMP, MTs, SMA, MA, sederajat)
421.4	Sekolah Kejuruan
421.5	Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
421.6	Kegiatan sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
421.7	Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata,widyawisata, lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains), Pelajar teladan, Pertukaran Pelajar
421.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.9	Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
422	Administrasi Sekolah
422.1	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, Masa Orientasi Sekolah
422.2	Tahun Pelajaran
422.3	Hari Libur
422.4	Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI

422.5	Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi
422.6	Ijazah, Sertifikat
422.7	Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)
423	Metode Belajar
423.1	Kuliah
423.2	Ceramah, Simposium, Seminar
423.3	Diskusi
423.4	Kuliah Lapangan, KKN, Magang/Praktek/PKL
423.5	Kurikulum
423.6	Karya Tulis, Karya Ilmiah
423.7	Ujian
424	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi)
424.1	Pertukaran Guru ke Luar Negeri
424.2	Sertifikasi Guru
425	Sarana Pendidikan
425.1	Bangunan Pendidikan
425.11	Gedung Sekolah
425.12	Kampus
425.13	Pusat Kegiatan
425.14	Perpustakaan
425.15	Laboratorium
425.2	Buku
425.3	Perlengkapan Pendidikan
425.4	Sistem Informasi pendidikan
425.5	Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
<b>426</b>	<b>KEOLAHRAGAAN</b>
426.1	Pembinaan Keolahragaan
426.11	Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade, dll)
426.12	Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni, dll)
426.13	Olah Raga Rekreasi / Massal (Senam, sepeda santai, olah raga tradisional)
426.14	Iptek dan Industri Olah Raga
426.15	Sarana Prasarana Keolahragaan
426.2	Kemitraan Olah Raga
<b>427</b>	<b>KEPEMUDAAN</b>
427.1	Pertukaran Pemuda (SMA sederajat, Mahasiswa dan Umum)
427.2	Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja
427.3	Kemitraan Pemuda (organisasi pemuda)
<b>430</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>
430.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan
430.2	Pembinaan bidang kebudayaan
431	Kesenian
431.1	Cabang Kesenian (Seni pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)
431.2	Sarana
431.21	Gedung Kesenian
431.22	Padepokan
431.23	Kegiatan adat/tradisi
431.3	Usaha pertunjukan,hiburan, kesenangan : festival, pentas seni
432	Kepurbakalan
432.1	Museum
432.2	Peninggalan Kuno
432.21	Benda
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Penghayat Kepercayaan
<b>440</b>	<b>KESEHATAN</b>
440.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kesehatan

441	Pembinaan Kesehatan
441.1	Gigi
441.2	Mata
441.3	Jiwa
441.4	Kanker
441.5	UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
441.6	Perawatan
441.7	Kesehatan masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb
441.8	Kesehatan Ibu dan Anak
441.9	JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
441.91	Jaminan lainnya
442	Obat-obatan
442.1	Pengadaan
442.2	Pemeriksaan obat
442.3	Penyimpanan obat
442.4	Distribusi obat
442.5	Pengawasan obat
442.51	Obat Generik
442.52	Obat Terlarang
442.53	Pemalsuan obat
443	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
443.1	Pencegahan Penyakit
443.2	Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L)
443.21	Kusta
443.22	Kelamin, HIV, AIDS, IMS
443.23	Frambusia
443.24	T.B.C
443.25	Kholera
443.26	SARS, Virus(covid) dan jenis penyakit lainnya
443.3	Pemberantasan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
443.31	Malaria
443.32	Dengue Haemorrhagic Fever (DHF), DBD
443.33	Filaria
443.34	Serangga
443.35	Rabies
443.36	Antrak
443.37	Leptosirosis
443.38	Chikungunya
443.39	Penyakit lainnya
443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
443.41	A. Pektoris
443.42	IMA (Irama Mastcmik Akut)
443.43	Hipertensi
443.44	Stroke
443.45	Diabetes Melitus
443.46	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks
443.47	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Mammae
443.48	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Hepar
443.49	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA Paru, dan penyakit lainnya
443.5	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
443.51	Imunisasi/vaksinasi
443.52	Surveilanse
443.53	Pestisida
443.54	Pencemaran udara
443.55	Jamban Keluarga
443.56	Kesehatan Institusi
443.6	Higiene sanitasi

443.61	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasa boga
443.62	Sarana air minum
443.63	Pestisida, insektisida
443.64	Pencemaran
443.65	Jamban keluarga, sanitasi rumah tangga
443.66	Kesehatan institusi, misal : Poskestren, sanitasi masjid dll
443.67	Higiene sanitasi CA. Mammae
443.68	Higiene sanitasi CA. Hepar
443.69	Higiene sanitasi CA. Paru
443.7	Kejadian Khusus
443.71	Dekompensasi kordosis (serangan jantung)
443.72	Asma
443.73	Psikosis
443.74	PPOM
443.75	Kecelakaan Lalu Lintas
443.76	Kejadian Luar Biasa (KLB)
444	Gizi dan Pengawasan Makanan
444.1	Kekurangan Makanan
444.2	Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi buruk
444.3	Keracunan makanan
444.4	Menu makanan rakyat
444.5	Gondok endemik (GAKI)
445	RSU, RSJ, RS Khusus
445.1	Pelayanan Medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum)
445.11	Rawat Inap
445.12	Rawat Jalan
445.13	IGD
445.14	IBS
445.15	ICU
445.16	MCU (Medical Check Up)
445.2	Penunjang Medis
445.21	Farmasi
445.22	Rekam Medik
445.23	Radiologi
445.24	Gizi
445.25	Laboratorium Klinik
445.26	Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
445.27	Bank Darah Rumah Sakit
445.28	Sanitasi Rumah Sakit
445.29	CSSD/Laundry
445.3	Keperawatan
445.4	Komite Medik
445.5	SPI (Satuan Pengawas Internal)
445.6	Mutu Rumah Sakit
445.61	Akreditasi
445.62	ISO
445.63	PSBH (Problem Solving for Better Hospital)
445.64	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
445.7	IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
445.8	Promosi layanan kesehatan
445.9	Kasus Hukum Rumah Sakit
446	Tenaga Medis
446.1	Perencanaan Tenaga Medis
446.2	Pendayagunaan Tenaga Medis
446.21	Perijinan untuk Tenaga Medis
446.22	Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
446.23	TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)

446.3	Diklat Tenaga Kesehatan/Medis
446.4	Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis
446.5	Pendidikan di bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis
447	Peralatan Kesehatan
447.1	Standarisasi
447.2	Penyimpanan
447.3	Distribusi
447.4	Perijinan berkaitan dengan Alat Kesehatan
448	Pengobatan Alternatif
448.1	Pijat
448.2	Akupunktur
448.3	Jamu dan herbal
448.4	Dukun/Tabib/shinse
449	Lembaga penyedia layanan kesehatan
449.1	PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
449.2	Poliklinik dan Balai Kesehatan
449.3	Rumah Bersalin
449.4	Posyandu
449.5	Laboratorium Kesehatan
449.6	Apotik
449.7	Sanatorium Kesehatan
<b>450</b>	<b>AGAMA</b>
450.1	Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan bidang keagamaan
450.2	Bantuan dibidang keagamaan
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.11	Sholat
451.12	Zakat, Infaq, Shodaqoh
451.13	Puasa
451.14	Umroh dan Haji
451.2	Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)
451.3	Tokoh Agama
451.4	Pendidikan Agama
451.41	Pendidikan Tinggi Agama
451.42	Menengah, MTs, MA
451.43	Dasar, Pra Sekolah, MI
451.44	Lembaga pendidikan Non Formal ( TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
451.45	Sarana pendidikan meliputi buku, gedung sekolah dll
451.46	Tenaga Pengajar
451.47	Dakwah (Pengajian, MTQ)
451.5	Wakaf
451.6	Mazhab Agama Islam
451.7	Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll)
451.8	Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
452	Kristen Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadah Gereja dll
452.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta,Domine dll)
452.4	Mazhab Agama Kristen Protestan
452.5	Organisasi Gerejani
453	Khatolik
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadah Gereja dll
453.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
453.4	Mazhab Agama Khatplik
453.5	Organisasi Gerejani

454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah Ibadah Candi, Pura dll
454.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
454.4	Mazhab Agama Hindu
454.5	Organisasi Agama Hindu
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadah Candi, Vihara dll
455.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
455.4	Mazhab Agama Budha
455.5	Organisasi Agama Budha
456	Kong Hu Cu
456.1	Peribadatan
456.2	Rumah Ibadah Klenteng dll
456.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
456.4	Mazhab Agama Kong Hu Cu
456.5	Organisasi Agama Kong Hu Cu
<b>460</b>	<b>SOSIAL</b>
461	Rehabilitasi Penyandang Cacat
461.1	Cacat Ganda
461.2	Cacat Fisik
461.3	Cacat Mental
462	Rehabilitasi Sosial
462.1	PGOT (Pengemis, Gelandangan/orang terlantar, anak jalanan)
462.2	Tuna Susila
462.3	Anak Nakal
462.4	Tuna Wisma
463	Kesejahteraan anak dan keluarga
463.1	Kesejahteraan Anak
463.11	Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
463.12	Perlindungan Anak
463.13	Anak asuh
463.2	Kualitas Hidup Perempuan
463.21	Perlindungan Perempuan
463.22	Ibu teladan
463.23	Pengarusutamaan Gender (PUG)
464	Keperintisan dan Kepahlawanan
464.1	Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya.
464.2	Veteran meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan.
465	Kesejahteraan Sosial
465.1	Lanjut usia
465.2	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
465.3	Masyarakat miskin : BST, BLT, PKH, BPNT, dan KJS
465.4	Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
466	Sumbangan / Jaminan Sosial
466.1	Korban Bencana
466.2	Pencarian dana untuk sumbangan : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar dsb
466.3	Panti Asuhan. Panti Wreda dan Rumah Sosial
466.4	TAGANA (Taruna Tanggap Bencana)
467	Bimbingan Sosial
468	PMI
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan

469.3	Khusus, Keluarga dll
<b>470</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>
470.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan
471	Pendaftaran Penduduk
471.1	Identitas Penduduk
471.11	Biodata
471.12	Nomor Induk Kependudukan
471.13	Kartu Tanda Penduduk
471.14	Kartu Keluarga
471.15	Advokasi Identitas Penduduk
471.2	Perpindahan penduduk dalam wilayah Indonesia
471.21	Perpindahan penduduk WNI
471.22	Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia
471.23	Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara
471.24	Daerah Terbelakang
471.3	Perpindahan Penduduk antar Negara
471.31	Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
471.32	Orang asing tinggal sementara
471.33	Orang asing tinggal tetap
471.34	Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)
471.4	Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
471.41	Akibat bencana alam
471.42	Akibat kerusakan sosial
471.43	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
471.44	Pendaftaran penduduk rentan
472	Pencatatan sipil
472.1	Kelahiran, kematian dan advokasi
472.11	Kelahiran
472.12	Kematian
472.13	Advokasi
472.2	Perkawinan, perceraian dan advokasi
472.21	Perkawinan agama Islam
472.22	Perkawinan agama non Islam
472.23	Perceraian agama Islam
472.24	Perceraian agama non Islam
472.25	Advokasi
472.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
472.31	Pengangkatan anak
472.32	Pengakuan anak
472.33	Pengesahan anak
472.34	Perubahan akta
472.35	Pembatalan akta
472.36	Advokasi
472.4	Pencatatan Kewarganegaraan
472.41	Akibat perkawinan
472.42	Akibat kelahiran
472.43	Non Perkawinan/Non Kelahiran
472.44	Naturalisasi
472.45	Perubahan WNI ke WNA
473	Informasi Kependudukan
473.1	Teknologi Informasi
473.2	Pengolahan Data Kependudukan
473.21	Pendaftaran penduduk
473.22	Kejadian vital penduduk
473.23	Penduduk non registrasi
473.3	Pelayanan informasi kependudukan

474	Perkembangan penduduk
474.1	Pengarahannya Kuantitas Penduduk
474.11	Struktur Jumlah
474.12	Komposisi
474.13	Fertilitas
474.14	Kesehatan Reproduksi
474.15	Morbiditas Penduduk
474.16	Mortalitas Penduduk
474.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk
474.21	Anak dan remaja
474.22	Penduduk usia produktif
474.23	Penduduk lanjut usia
474.24	Gender
474.3	Penataan Persebaran Penduduk
474.31	Migrasi antar wilayah
474.32	Urbanisasi
474.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
474.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan
<b>475</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>
475.1	Penyiapan informasi daerah transmigrasi
475.11	Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi
475.12	Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
475.13	Permasyarakatan/sosialisasi transmigrasi
475.14	Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
475.15	Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian
475.16	Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
475.17	Kerjasama di bidang transmigrasi
475.18	Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik
475.2	Pemukiman transmigrasi
475.21	Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi
475.22	Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
475.23	Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
475.24	Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi /peta informasi pemukiman
475.25	Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum /sosial dan jaringan transportasi
475.26	Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
475.27	Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi
475.28	Tata ruang pemukiman transmigrasi
475.281	Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
475.282	Rancangan kapling TSM
475.283	Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
475.284	Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
475.285	Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
475.286	Pengukuran batas unit pemukiman
475.287	Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
475.29	Sarana pemukiman transmigrasi
475.291	Pembinaan dan pengadilan, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum
475.292	Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
475.293	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
475.294	Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
475.295	Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
475.3	Pengarahannya, pemindahan dan penempatan



475.31	Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
475.32	Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
475.33	Pengerahan
475.331	Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
475.332	Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran
475.333	Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
475.34	Pemberangkatan transmigran
475.341	Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat
475.342	Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
475.343	Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
475.344	Pengawasan perjalanan transmigran
475.345	Pengaturan rute pemberangkatan
475.346	Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
475.35	Penempatan Transmigran
475.351	Kesiapan lokasi dan daya tampung
475.352	Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina
475.353	Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
475.354	Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
475.4	Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran
475.41	Pelatihan transmigran
475.411	Program pengajaran dan metode pelatihan
475.412	Penyusunan silabus dan modul pelatihan
475.413	Penyusunan calon peserta/pelatih
475.42	Penampungan transmigran di transito
475.421	Pelayanan kesehatan bagi transmigran
475.422	Pelayanan makanan bagi transmigran
475.423	Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran
475.5	Pembinaan masyarakat transmigrasi
475.51	Identifikasi dan penjajagan pembinaan
475.511	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
475.512	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
475.513	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan
475.52	Pembinaan Pendidikan
475.521	Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
475.522	Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
475.53	Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
475.54	Pembinaan kesehatan
475.541	Penyediaan sarana kesehatan dan KB
475.542	Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
475.543	Pendistribusian bantuan pangan
475.55	Pembinaan rokhani
475.551	Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
475.552	Bimbingan adaptasi masyarakat
475.553	Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial
475.56	Pelayanan pos di daerah transmigrasi
475.57	Penyerahan UPT yang layak untuk di serahkan
475.58	Penilaian transmigran teladan
475.59	Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
<b>476</b>	<b>KELUARGA BERENCANA</b>
476.1	Alat Kontrasepsi
476.2	Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
476.3	Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
476.4	Pos KB
476.5	Akseptor KB
<b>480</b>	<b>MEDIA MASSA</b>

480.1	Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bidang media massa
481	Media Cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
481.1	Surat Kabar
481.2	Majalah
481.3	Buletin
481.4	Jurnal
481.5	Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik
481.51	Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok
481.52	Perekonomian dan Perbankan
481.53	Bidang lainnya
481.6	Layanan Informasi/Leaflet
481.7	Masukan Analisis Wali Kota
482	Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
482.1	Radio
482.2	Televisi
482.3	Film Dokumenter
482.4	Pengawasan Lembaga Penyiaran
482.5	Kelompok Pemantau Isi Siaran
482.6	Pengkajian Isi Siaran
482.7	SDM Penyiaran
483	Periklanan
483.1	Ketentuan Pemasangan reklame
483.2	Pameran
484	Kewartawanan/Jurnalistik
484.1	Pembentukan Organisasi Profesi
484.2	Kasus-kasus kewartawanan
484.3	Penyalahgunaan Profesi
484.4	Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan
484.5	Musyawarah Wartawan Indonesia
484.6	Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan
484.7	Temu Pers/Konferensi Pers
484.8	Pers Tour
484.9	Kunjungan Wartawan Asing
485	Penyuluhan Masyarakat
485.1	Publikasi
485.2	Pendirian information center
486	Pembinaan bidang Infokom
486.1	Training Fotografi
486.2	Training Berita Jurnalistik
486.3	Bintek Infokom
486.4	Rakorda Infokom
486.5	Rakor Pengendalian Kegiatan
486.6	Pengelolaan website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
487	Hubungan Antar Lembaga
487.1	Non Pemerintah
487.11	Wahana Komunikasi Masyarakat
487.12	Lembaga Komunikasi Masyarakat
487.2	Lembaga Pemerintah
487.21	Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
487.22	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
487.3	Luar negeri
487.31	Promosi luar negeri
487.32	Kunjungan Wartawan asing
488	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
489	Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Kepala Daerah
489.1	Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif
489.2	Dialog Interaktif

489.3	Rubrik
489.4	Materi /pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif
489.5	Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan
<b>500</b>	<b>PEREKONOMIAN</b>
500.1	Dewan stabilisasi
501	Pengadaan Pangan
502	Pengadaan Sandang
503	Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, klasifikasi pada masalahnya
<b>510</b>	<b>PERDAGANGAN</b>
510.1	Promosi perdagangan
510.11	Pekan raya
510.12	Iklan
510.13	Pameran
510.14	Event-event
510.15	Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
510.2	Pelelangan, distribusi
510.21	Pemasaran Sembako
510.22	Pemasaran hasil industri
510.23	Penentuan harga pokok
510.3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
510.31	Rencana dan Program kerja
510.32	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
510.33	Pelaksanaan Teknis
510.34	Pemantauan
510.35	Evaluasi dan Pelaporan
510.4	Perijinan Bidang Perdagangan
510.41	Penerbitan Surat Ijin Bidang Perdagangan
510.42	Perpanjangan Surat Ijin Bidang Perdagangan
510.43	Rekomendasi Surat Ijin Bidang Perdagangan
510.5	Perdagangan antar Pulau
510.51	Kerjasama bahan baku
510.52	Industri pemasaran
510.53	Kontrak
510.6	T e r a
510.61	Tera dan Tera Ulang
510.62	Takaran
510.63	Timbangan dan anak timbangan
510.64	Kalibrasi
510.65	Cap tanda tera
510.66	Biaya tera
510.67	Pengawasan
510.7	Bantuan peralatan
510.71	Proposal
510.72	Surat perjanjian / kontrak
510.73	Serah terima
510.8	Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik
510.9	Kemetrologian
510.91	Standart Tingkat Tiga
510.92	Standart Kerja Satuan Ukuran
510.93	Ukuran Metrologi
510.931	Peralatan
510.932	Laboratorium Metrologi Legal
510.933	Tanki Ukur Mobil
510.934	Meter Taxi
510.935	KWH Meter termasuk didalamnya listrik dan PDAM
510.936	S P B U

511	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll
511.2	P a s a r
511.3	Pertokoan, kaki lima, kios
511.4	Pusat perbelanjaan
512	Ekspor
512.1	Ekspor Hasil Industri
512.2	Ijin Ekspor
512.3	Pengembangan Pasar Luar Negeri
512.4	Managemen Perdagangan Internasional
512.5	Eksport Hasil Industri
512.51	Kebijakan
512.52	Pemasaran
512.6	Pemberitahuan Eksport Barang
512.7	Pengawasan Mutu Barang
512.8	Eksportir Terdaftar
512.9	Evaluasi dan pelaporan
513	Impor
513.1	Ijin Impor
513.11	Pemberian ijin
513.12	Pengendalian ijin
513.2	Standart Mata Dagang Import
513.3	Management Perdagangan Internasional
513.4	Kegiatan Import
513.41	Pembinaan Import
513.42	Pengendalian Import
513.43	Pemantauan Import
513.5	Faktor-faktor Pendukung
513.6	Pengawasan Mutu Barang Import
513.7	Penyaluran Kegiatan Import
513.71	Bahan Konsumsi
513.72	Bahan Baku
513.73	Bahan Penolong
513.8	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
514	Perdagangan Antar Pulau
514.1	Kerjasama Bahan Baku
514.2	Industri Pemasaran
514.3	Kontrak
515	Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri
515.1	Promosi dan Informasi
515.2	Pameran
515.3	Kerjasama
516	Pergudangan
517	Aneka usaha perdagangan
<b>518</b>	<b>KOPERASI</b>
518.1	Bina Usaha Koperasi
518.11	Koperasi Pertanian
518.12	Koperasi Non Pertanian
518.13	Permodalan Koperasi
518.131	Pemupukan Modal
518.132	Pemanfaatan Modal
518.133	Perbankan dan Asuransi
518.134	Permodalan Luar Koperasi
518.135	Kredit Program Umum
518.136	Kredit Program Khusus
518.14	Distribusi dan Jasa Koperasi
518.141	Distribusi Bahan Pokok

518.142	Distribusi Aneka Bahan
518.143	Distribusi Kerjasama Niaga
518.144	Jasa Angkutan
518.145	Jasa Perumahan
518.146	Aneka Jasa
518.15	Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
518.2	Bina Lembaga Koperasi
518.21	Organisasi Koperasi
518.211	Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
518.212	Pemberian Badan Hukum Koperasi
518.213	Penyelesaian Pembubaran Koperasi
518.214	Keragaan Koperasi
518.215	Pengakuan Koperasi Sekolah
518.216	Amalgamasi
518.217	Tertib Organisasi Koperasi
518.218	Penyelesaian Penyelisihan/Persengketaan
518.219	Bimbingan Kesadaran Hukum
518.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
518.221	Rapat Anggota Tahunan Koperasi
518.222	Pengurus dan Badan Pemeriksa
518.223	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
518.224	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
518.23	Bina Tata Laksana Koperasi
518.231	Klasifikasi Koperasi Perkotaan
518.232	Klasifikasi Koperasi Sekunder
518.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
518.241	Administrasi Koperasi Perkotaan
518.242	Karyawan/Manager Koperasi
518.243	Sumber Daya Manusia
518.244	Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)
518.245	Penyaluran Alat Sekolah
518.246	Bantuan Pemerintah kepada Koperasi/KUD
518.25	Akuntansi
518.251	Akuntansi Koperasi Perkotaan
518.252	Akuntansi Koperasi Sekunder
518.26	Pengawasan Koperasi
518.261	Pengawasan Koperasi Primer
518.262	Pengawasan Koperasi Sekunder
518.263	Koperasi Jasa Audit
518.264	Kerjasama Kantor Akuntan
518.27	Penyuluhan Koperasi
518.271	Pembinaan Kader Koperasi
518.272	Masyarakat Umum
518.273	Forum Komunikasi
518.274	Kelompok Tani
518.275	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
518.276	Penilaian Tingkat Nasional
518.3	Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)
518.31	Pemberdayaan Usaha
518.311	Pembinaan Usaha Mikro
518.312	Pembinaan Usaha Kecil
518.313	Pembinaan Usaha Menengah
518.32	Pengembangan Usaha
518.321	Pengawasan Usaha Mikro
518.322	Pengawasan Usaha Kecil
518.323	Pengawasan Usaha Menengah
<b>520</b>	<b>PERTANIAN</b>
<b>521</b>	<b>TANAMAN PANGAN</b>

521.1	Rencana dan Program
521.11	Bimas/Inmas Termasuk Kredit
521.12	Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
521.2	Produksi
521.21	Padi
521.22	Palawija
521.23	Hortikultura (sayuran, buah-buahan, dll)
521.24	Panen Gagal (Puso)
521.3	Sarana Usaha Pertanian
521.31	Peralatan
521.32	Meliputi traktor dan sebagainya
521.33	Pembenihan dan pembibitan
521.34	Pupuk
521.35	Irigasi Pertanian
521.36	Rehabilitasi Lahan Pertanian
521.4	Perlindungan Tanaman
521.41	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
521.411	Penyakit Tanaman Pangan
521.412	Hama tanaman pangan
521.42	Pemberantas
521.421	Pestisida
521.422	Agensia Pengendalian Hayati
521.43	Tanah Pertanian Pangan
521.431	Persawahan
521.432	Perladangan
521.433	Kebun
521.5	Pengusaha, Petani
521.6	Lahan kritis
521.7	Pemasaran dan Promosi Pertanian
521.8	Pengembangan Sumber Daya Pertanian
<b>522</b>	<b>KEHUTANAN</b>
522.1	Hutan kota
<b>523</b>	<b>PERIKANAN</b>
523.1	Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan
523.11	Penyuluhan
523.12	Teknologi
523.2	Produksi Perikanan
523.21	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
523.22	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC
523.23	Sertifikasi Kesehatan Ikan
523.3	Usaha Perikanan
523.31	Fasilitas perijinan : SIUP, SIPI, SKP
523.32	Perbenihan
523.4	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
523.41	Ekspor Hasil Perikanan
523.42	Impor Hasil Perikanan
523.43	Pemasaran Dalam Negeri
523.44	Pengusaha perikanan
523.5	Sarana Perikanan
523.6	Pengendalian hama dan penyakit
523.61	Penyakit ikan
523.62	Hama ikan
523.63	Obat-obatan termasuk sertifikasinya
<b>524</b>	<b>PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
524.1	Produksi
524.11	Perbibitan
524.12	Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
524.13	Budidaya

524.2	Usaha Peternakan
524.21	Pelayanan Usaha
524.22	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
524.23	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
524.3	Kesehatan Hewan
524.31	Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
524.32	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
524.33	Obat-obat Hewan
524.34	Pelayanan Kesehatan Hewan
524.4	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
524.41	Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
524.42	Hygieni dan Sanitasi
524.43	Produk Hewani
524.5	Laboratorium Kesehatan Hewan
524.51	Pengujian Mutu Asal Hewan
524.52	Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan
524.6	Inseminasi Buatan
524.61	Produksi Distribusi dan Pemasaran
524.62	Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi
524.7	Pembibitan dan Budi Daya Ternak
524.71	Ternak Non Ruminansia
524.72	Ternak Ruminansia
<b>525</b>	<b>PERKEBUNAN</b>
525.1	Program dan Pelaporan
525.2	Produksi
525.3	Usaha Perkebunan
525.4	Perlindungan Tanaman
525.5	Alat dan Mesin Perkebunan
525.6	Pengolahan lahan
525.7	Pemasyarakatan
<b>526</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>
526.1	Program Bimbingan Massal
526.11	Pemanfaatan Lahan Pekarangan
526.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya
526.21	Pembinaan Teknologi
526.22	Sarana Produksi dan Permodalan
526.23	Kelembagaan
526.3	Agribisnis
526.31	Mutu Hasil
526.32	Pengelola Hasil Pangan
526.33	Pemasaran Hasil
526.34	Kementrian
526.4	Distribusi Pangan
526.41	Sistem dan Pola Distribusi
526.42	Sarana dan Prasarana Distribusi
526.43	Pengadaan dan Cadangan Pangan
526.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
526.51	Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
526.52	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
526.53	Sistem Informasi Pangan
526.6	Cadangan Pangan
<b>527</b>	<b>PENYULUHAN</b>
527.1	Sumber Daya Manusia
527.11	Penyuluh
527.12	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.13	Stakeholder
527.2	Kelembagaan
527.21	Struktural

527.22	Non Struktural
527.23	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.24	Lembaga Profesi
527.3	Penyelenggaraan Penyuluhan
527.31	Program/Metode
527.32	Promosi/pameran/kampanye
527.33	Penghargaan/lomba
527.34	Materi
<b>530</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>
531	Perizinan
531.1	Industri Logam
531.2	Industri Mesin/Elektronik
531.3	Industri Kimia/Farmasi
531.4	Industri Tekstil
531.5	Industri Makanan/Minuman
531.6	Industri Lainnya
532	Perencanaan Pembangunan Industri
533	Sistem Informasi Industri Nasional
534	Aneka Industri/Perusahaan
534.1	Home Industri
535	Aneka Kerajinan
535.1	Kerajinan Rakyat
536	Usaha Negara
536.1	Persero
537	Perusahaan Daerah
<b>540</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
541	Minyak dan Gas Bumi
542	Energi
543	Pertambangan, mineral dan batubara
544	Air tanah
544.1	Cekungan Air Tanah (CAT)
544.2	Rekomendasi Teknis
544.3	Sumur Artesis
544.4	Sumur Bor
544.5	Sumur Gali (Pasak)
544.6	Pengusaha Pengebor (APATINDO)
544.7	Sumur Pantau
544.8	Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air
544.9	Hidrologi
545	Geologi
546	Hidrologi
547	Kesamudraan
548	Penghematan energi
549	Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
<b>550</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>
551	Perhubungan Darat
551.1	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
551.11	Uji Kelayakan kendaraan Bermotor (Keur)
551.12	Kecelakaan Lalu Lintas
551.2	Angkutan Jalan Raya
551.21	Perizinan
551.22	Terminal
551.23	Alat Angkutan
551.25	Uji Mutu
551.3	Angkutan Sungai
552	Perhubungan Laut
553	Perhubungan Udara
<b>554</b>	<b>POS</b>



554.1	Pembinaan
554.11	Kebutuhan fasilitas
554.12	Rehabilitasi/Perawatan
554.13	Bina Usaha/Pengawasan/Penertiban
554.14	Standarisasi Perangkat
554.15	Tanah/Bangunan
554.16	Filateli
554.17	Asosiasi
554.18	Laporan dan Evaluasi
554.2	Pelayanan
554.21	Jasa Pos
554.22	Jasa Titipan
554.23	Jasa Giro
554.24	Benda Pos/Perangko
554.25	Sampul Peringatan
554.26	Jasa Pos Elektronik
554.3	Perijinan
554.31	Rekomendasi Usaha Jasa Pos/Titipan
554.32	Pembukaan Agen/Cabang
554.4	Gangguan Sarana dan Prasarana
554.41	Kecelakaan
554.42	Sabotase
554.43	Penyeludupan
<b>555</b>	<b>TEKNOLOGI INFORMASI</b>
555.1	Kebijakan
555.2	Peralatan
555.21	Telepon
555.22	Internet/USO
555.23	Telegram, Telex/SBB, Faximile
555.24	Satelit, Stasiun Bumi
555.25	Radio komunikasi
555.3	Sistem
555.4	Pembinaan/Penertiban
555.5	Perijinan
<b>556</b>	<b>PARIWISATA DAN REKREASI</b>
556.1	Usaha Pariwisata
556.11	Usaha Jasa Pariwisata
556.111	Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
556.112	Restoran dan Rumah Makan
556.12	Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
556.13	Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.14	Usaha Sarana Pariwisata
556.141	Ijin Pariwisata
556.142	Ijin Usaha Pariwisata
556.143	Ijin Usaha Jasa Pariwisata
556.144	Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.145	Ijin Usaha Sarana
556.15	Wisatawan
556.151	Wisatawan Nusantara
556.152	Wisatawan Mancanegara
556.16	Promosi dan Informasi Pariwisata
556.161	Dalam Negeri
556.162	Luar Negeri
556.2	Perhotelan
556.21	Status Hotel
556.22	Kelas Hotel
556.23	T a r i f
556.3	Travel Service

556.31	Pramu Wisata
556.32	Biro Perjalanan/Angkutan Wisata
556.33	Souvenir
556.34	Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi
556.41	Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.411	Ciptaan Tuhan
556.412	Hasil Karya Manusia
556.42	Rehabilitasi/Perawatan
556.43	Pengembangan Fasilitas
556.44	Tanah/Bangunan
556.45	Bina Usaha
556.46	Institusi
556.461	Asosiasi
556.462	Lembaga Kepariwisata
556.5	Pengembangan Ekonomi Kreatif
<b>557</b>	<b>METEOROLOGI</b>
<b>560</b>	<b>TENAGA KERJA</b>
560.1	Data Permintaan TKI/TKW Dari Luar Negeri
560.11	Data Persediaan TKI/TKW Dari Daerah
560.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
560.3	Rekrutmen Calon TKI/TKW
560.4	Seleksi Naker Ke Luar Negeri
560.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW
560.42	Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW
560.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW
560.5	Persyaratan Naker TKI/TKW
560.51	Permohonan Rekomendasi Passport
560.52	Perjanjian Kerja TKI/TKW
560.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.54	Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
560.55	Pelatihan TKI/TKW
560.6	Pemberangkatan Naker
560.61	Pemberangkatan Ke Luar Negeri
560.62	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri
560.63	Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
560.7	Pemulangan Naker
560.71	Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis
560.72	Pemulangan TKI/TKW Ilegal
560.73	TKI/TKW Terkena Kasus Pidana
561	Upah
561.1	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional
561.2	Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum
561.3	Kebutuhan Fisik Minuman
561.4	Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)
561.5	Laporan Data Remittance
561.6	Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
562	Penempatan
562.1	Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
562.11	Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
562.12	Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional
562.13	Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja
562.2	Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
562.3	Lembaga Penyalur Naker
562.31	Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)
562.32	Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
562.33	Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)

563	Latihan Kerja
563.1	Pendidikan Pekerja
563.11	Pendidikan dan Latihan Kerja
563.12	Diklat Di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
563.13	Diklat Di Luar Negeri (Pemagangan)
563.2	Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
563.21	Tempat Pelatihan (BLK)
563.22	Instruktur/Pelatihan
563.23	Modul/Silabus dan Bahan Praktek
563.24	Kurikulum dan Metode Pengajaran
563.25	Sertifikat
563.3	Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
564	Tenaga Sukarela
564.1	Butsi
564.2	Padat Karya
565	Perselisihan Pekerja
565.1	Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
565.11	Pengaduan Perkara Pekerja/NAKER
565.12	Pemeriksaan Perkara Pekerja/NAKER
565.13	Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja/NAKER
565.14	Sidang Perkara Perselisihan Pekerja/NAKER
565.15	Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)
565.16	Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD/P4P)
565.17	Permintaan Eksekusi Terhadap hasil Keputusan KP2K (PAD/P4P)
565.18	Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PAD/P4P)
565.2	Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja
566	Keselamatan Kerja
566.1	Instalasi Proteksi Kebakaran
566.2	Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
566.3	Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
566.4	Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
566.5	Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
566.6	Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
566.7	Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
566.8	Perlengkapan Sarana Kerja
566.81	Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/angkut)
566.82	Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel uap)
566.83	Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
566.84	Pemasangan dan Pemakaian Tangki tak Bertekanan
566.85	Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
566.9	Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk malam Hari (sifht malam)
567	Pemutusan Hubungan Kerja
567.1	Pengaduan PHK Sepihak
567.2	PHK Masal
567.3	Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK
567.4	Ijin Melakukan PHK
567.5	Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHK
567.6	Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang di PHK
567.7	Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK
568	Kesejahteraan Pekerja
568.1	Bantuan Kredit/bantuan Modal kerja bagi Naker
568.11	Pemilihan Pekerja Teladan
568.2	Perumahan Pekerja
568.3	Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
568.4	Koperasi Pekerja
568.5	Sarana Transportasi Pekerja
568.6	Perpustakaan Pekerja
568.7	Tempat Ibadah Pekerja

568.8	Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
568.9	Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan
568.91	Lembaga Kerjasama Bipartid
569	Tenaga Kerja Orang Asing
569.1	Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
569.2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
569.3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
569.4	Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
569.5	Data Tenaga Kerja Asing
569.6	Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
569.7	Pemulangan Tenaga Kerja Asing
569.8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
569.9	Tenaga Kerja Asing Ilegal
<b>570</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>
570.1	Penanaman Modal Dalam Negeri
570.2	Penanaman Modal Asing
571	Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal)
572	Pasar Uang dan Modal
573	Saham
<b>580</b>	<b>PERBANKAN MONETER</b>
581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan
584	Bank Pembangunan Daerah
584.1	Bank Jateng
584.2	BKK, BPR BKK, Bank Pasar
585	Asuransi
585.1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung/Pemegang Polis
585.5	Uang Pertanggungan
586	Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter
<b>590</b>	<b>AGRARIA</b>
591	Tata Guna Tanah
591.1	Pemetaan dan Pengukuran
591.2	Perpetaan
591.3	Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
591.4	Fakta Tata Guna Tanah
591.5	Tanah Kritis
592	Landreform
592.1	Redistribusi
592.11	Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
592.12	Penentuan Tanah Obyek Landreform
592.13	Pembagian Tanah Landreform
592.14	Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
592.2	Ganti Rugi
592.21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.22	Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.23	Ganti Rugi Tanah Absentee
592.24	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
592.25	Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.26	Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.3	Bagi hasil
592.31	Penetapan Imbangan Gadai Tanah
592.32	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

592.33	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
592.4	Gadai Tanah
592.41	Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
592.42	Pelaksanaan Gadai Tanah
592.43	Sengketa Gadai Tanah
592.5	Bimbingan dan Penyuluhan
592.6	Pengembangan
592.7	Yayasan Dana landreform (YDL)
593	Pengurusan Hak-hak Tanah
593.1	Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
593.11	Sewa Tanah
593.12	Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus
593.2	Hak Milik
593.21	Perorangan
593.22	Badan Hukum
593.3	Hak Pakai
593.31	Perorangan
593.311	Warga Negara Indonesia
593.312	Warga Negara Asing
593.32	Badan Hukum
593.321	Badan Hukum Indonesia
593.322	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
593.33	Tanah Gedung-Gedung Negeri
593.4	Guna Usaha
593.41	Perkebunan Besar
593.42	Perkebunan Rakyat
593.43	Peternakan
593.44	Perikanan
593.45	Kehutanan
593.5	Hak Guna Bangunan
593.51	Perorangan
593.52	Badan Hukum
593.53	P3MB ( Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda )
593.54	Badan Hukum Asing Belanda–PBK No.5/56
593.55	Pemulihan Hak ( Pen Pres 4/1960 )
593.6	Hak Pengelolaan
593.61	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
593.62	Perusahaan daerah Pembangunan Perumahan
593.7	Sengketa Tanah
593.71	Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)
593.8	Pencabutan dan Pembebasan Tanah
593.81	Pencabutan Hak
593.82	Pembebasan Tanah
593.83	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
594.1	Pengukuran/Pemetaan
594.11	Fotogrametri
594.12	Terristris
594.13	Triangulasi
594.14	Peralatan
594.2	Dana Pengukuran ( Permen Agraria No. 6/1960 )
594.3	Sertifikat
594.4	Penjabat Pembuatan Akte Tanah
595	Transmigrasi
595.1	Tata Guna Tanah
595.2	Landreform
595.3	Pengurusan Hak-hak Tanah
595.4	Pendaftaran Tanah

<b>600</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN</b>
603	Arsitektur
604	Bahan bangunan
604.1	Tanah dan batu
604.2	Aspal
604.3	Besi dan logam lainnya
604.4	Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech oil, pengawet kayu)
604.5	S e m e n
604.6	K a y u
604.7	Bahan penutup Atap
604.8	Alat-alat penggantung dan pengunci
604.9	Bahan-bahan bangunan lainnya
605	I n s t a l a n s i
605.1	Instalansi bangunan
605.2	Instalansi listrik
605.3	Instalansi air/sanitasi
605.4	Instalansi pengatur udara
605.5	Instalansi akustik
605.6	Instalansi cahaya/penerangan
606	Konstruksi pencegahan
606.1	Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran
606.2	Terhadap gempa
606.3	Terhadap angin/udara/panas
606.4	Terhadap kegaduhan
606.5	Terhadap gas/explosive
606.6	Terhadap serangga
606.7	Terhadap radiasi atom
<b>610</b>	<b>P E N G A I R A N</b>
611	Irigasi
611.1	Pelimpahan banjir
611.12	Sumur dengan pompa
611.13	Kantung lumpur
611.14	Silf ekstretor
611.15	Escope chenel
611.2	Bangunan pembawa
611.21	Saluran
611.22	Saluran induk
611.23	Saluran sekunder
611.24	Suplesi
611.25	Tersier
611.26	Saluran kwarter
611.27	Saluran pasangan
611.28	Saluran tertutup / terowongan
611.3	Bangunan
611.31	Bangunan bagi
611.32	Bangunan dan sadap
611.33	Bangunan sadap
611.34	Bangunan check
611.35	Bangunan terjun
611.36	Bax Tersier
611.37	Got miring
611.38	Talang
611.39	Syphon
611.40	Gorong-gorong
611.41	Pelimpahan samping
611.4	Bangunan Pembuangan
611.41	Saluran
611.411	Saluran Pembuangan induk

611.412	Saluran Pembuangan sekunder
611.413	Saluran Pembuangan tersier
611.42	Bangunan
611.421	Bangunan out let
611.422	Bangunan terjun
611.423	Bangunan penahan banjir
611.43	Gorong-gorong pembuangan
611.44	Talang pembuang
611.45	Syphon pembuangan
611.5	Bangunan lainnya
611.51	Jalan
611.52	Jembatan
611.53	Bangunan penunjang
611.54	Jaringan telepon
612	P o l d e r
612.1	Bangunan penutup sungai
612.2	Bangunan pembawa
612.21	Saluran
612.22	Bangunan bagi :
612.221	Gorong-gorong
612.222	Syphon
612.3	Bangunan pembuangan
612.4	Bangunan lainnya
613	Pasang surut
613.1	Bangunan pembawa
613.2	Bangunan pembuangan
613.3	Bangunan lainnya
613.31	Bangunan air
613.32	Jalan
613.33	Jembatan
614	Pengendalian sungai
614.1	Bangunan pengaman
614.2	Saluran pengaman
614.3	Bangunan lainnya
<b>620</b>	<b>J A L A N</b>
621	Jalan Kota
621.1	Daerah Penguasaan
621.2	Bangunan sementara
621.3	Badan Jalan
621.4	Perkerasan
621.5	Drainage
621.6	Buku Trotoir
621.7	M e d i u m
621.8	Daerah sampingan
621.9	Bangunan Pelengkap dan Pengaman
621.91	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
621.92	Lampu Penerangan
621.93	Lampu Pengaturan lalu Lintas
621.94	Patok-patok KM
621.95	Patok-patok R.O.W. (Sempadan)
621.96	Rel Pengamanan
621.97	P a g a r
621.98	Turap Penahan
621.99	Bronjong
622	Jalan Provinsi
622.1	Daerah penguasaan
622.2	Badan jalan
622.3	Perkerasan (pavement)

622.4	Drainage
622.5	Trottoir
622.6	Medium
622.7	Daerah samping
622.8	Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan
622.81	Rambu-rambu
622.82	Lampu penerangan
622.83	Lampu Pengatur lalu lintas
622.84	Patok-patok KM
622.85	Patok-patok R,O,W (sempadan)
622.86	Rel pengamanan
622.87	Pagar
622.88	Turap penahan
622.89	Bronjong
623	Jalan Nasional
623.1	Daerah penguasaan
623.2	Badan jalan
623.3	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan)
623.4	Drainase (gorong-gorong, parit)
623.5	Median
623.6	Daerah samping (pagar, tanaman)
623.7	Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)
<b>630</b>	<b>JEMBATAN</b>
631	Jembatan pada jalan Kota
631.1	Daerah penguasaan
631.11	Tanah
631.12	Tanaman
631.13	Bangunan
631.2	Bangunan sementara
631.21	Jalan sementara
631.22	Jembatan sementara
631.23	Kantor Proyek
631.24	Gedung Proyek
631.25	Barak kerja
631.26	Laboratorium lapangan
631.27	Rumah
631.3	Pekerjaan tanah (earth work)
631.31	Galian tanah
631.32	Timbunan tanah
631.4	Pondasi
631.41	Pondasi kepala jembatan
631.42	Pondasi pilar
631.43	Pondasi angker
631.5	Bangunan bawah
631.51	Kepala jembatan
631.52	Pilar
631.53	Piloon
631.54	Landasan
631.6	Bangunan
631.61	Gelagar
631.62	Lantai
631.63	Perkerasan
631.64	Jalan orang/trottoir
631.65	Sandaran
631.66	Talang air
631.7	Bangunan pengaman
631.71	Turap/penahan
631.72	Bronjong



631.73	Strek Dam
631.74	Kist Dam
631.75	Coupute
631.76	Krip
631.8	Bangunan pelengkap
631.81	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
631.82	Patok pengamanan
631.83	Patok R.O.W. (sempadan)
631.9	Oprit
631.91	Badan
631.92	Perkerasan
631.93	Drainage
631.94	Baku
631.95	Mediun
632	Jembatan pada jalan Provinsi
632.1	Daerah penguasaan
632.11	Tanah
632.12	Tanaman
632.13	Bangunan
632.2	Bangunan sementara
632.21	Jalan sementara
632.22	Jembatan sementara
632.23	Kantor Proyek
632.24	Gedung Proyek
632.25	Barak kerja
632.26	Laboratorium lapangan
632.27	Rumah
632.3	Pekerjaan tanah (earth work)
632.31	Galian tanah
632.32	Timbunan tanah
632.4	Pondasi
632.41	Pondasi kepala jembatan
632.42	Pondasi pilar
632.43	Pondasi angker
632.5	Bangunan bawah
632.51	Kepala jembatan
632.52	Pilar
632.53	Piloon
632.54	Landasan
632.6	Bangunan
632.61	Gelagar
632.62	Lantai
632.63	Perkerasan
632.64	Jalan orang/trotoir
632.65	Sandaran
632.66	Talang air
632.7	Bangunan pengaman
632.71	Turap/penahan
632.72	Bronjong
632.73	Strek Dam
632.74	Kist Dam
632.75	Coupute
632.76	Krip
632.8	Bangunan pelengkap
632.81	Rambu-rambu/tanda-tanda lau lintas
632.82	Patok pengamanan
632.83	Patok R.O.W. (sempadan)
632.9	Oprit

632.91	Badan
632.92	Perkerasan
632.93	Drainage
632.94	Baku
632.95	Mediun
633	Jembatan pada jalan Nasional
633.1	Daerah Penguasaan (tanah, tanaman bangunan)
633.2	Bangunan sementara (gudang proyek, kantor proyek)
633.3	Pondasi
633.4	Bangunan bawah
633.5	Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)
633.6	Bangunan pengamanan (bronjong strek dam, krib)
633.7	Bangunan pelengkap dan pengaman (rambu-rambu)
<b>640</b>	<b>BANGUNAN</b>
641	Bangunan Pemerintah
641.1	Rumah Dinas
641.2	Gedung DPRD
641.3	Gedung Balai Kota
641.4	Penjara
641.5	Perkantoran
642	Bangunan Pendidikan
642.1	Taman Kanak-kanak
642.2	SD & Sekolah Menengah
642.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
643.1	Bangunan Olah Raga
643.2	Gedung Kesenian
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Pusat Perbelanjaan
644.2	Gedung Perdagangan
644.3	B a n k
644.4	Perkantoran
645	Bangunan Pelayanan Umum
645.1	Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum
645.2	Gedung parkir
645.3	Rumah sakit
645.4	Gedung telkom
645.5	Terminal Angkutan Umum
645.6	Terminal Angkutan Darat
645.8	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1	Monumen
646.2	Rumah Tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal
649	Elemen Bangunan
649.1	Pondasi
649.11	Diatas tiang
649.2	Dinding
649.21	Penahan beban
649.22	Tidak menahan beban
649.3	A t a p
649.4	Lantai/langit-langit
649.41	Suspendend
649.42	Solit
649.5	Pintu/jendela
649.51	Pintu hermonik
649.52	Pintu biasa

649.53	Pintu sorong
649.54	Jendela kayu
649.55	Jendela sorong
649.56	Jendela vertikal
<b>650</b>	<b>TATA RUANG KOTA</b>
651	Daerah perdagangan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan
653	Daerah Perumahan ( site & servei )
653.1	Kepadatan Rendah ( low density )
653.2	Kepadatan Tinggi ( high density )
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah ( home industri )
655	Daerah Rekreasi ( open spece )
655.1	Publik Garden
655.2	Sport & playing fields
655.3	Open space
656	Transportasi ( tata letak )
656.1	Jaringan jalan
656.11	Penerangan jalan
656.2	Jaringan sungai
657	Assineering
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.31	Air Buangan Industri
658.4	Kegaduhan
658.5	Kebersihan kota
<b>660</b>	<b>TATA LINGKUNGAN</b>
660.1	Lingkungan Hidup
660.2	Kebersihan Lingkungan
660.3	Pencemaran
660.31	Pencemaran Air
660.32	Pencemaran Udara
660.33	Pencemaran Tanah
660.34	Pencemaran Limbah Padat Dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
661	Kerusakan lingkungan
662	Pentaatan Hukum Lingkungan
663	Laboratorium Lingkungan
664	Analisis Dampak Lingkungan
665	Pengembangan Teknologi Lingkungan
666	Pengembangan Kapasitas
667	Pengamanan Lingkungan
<b>670</b>	<b>KETENAGAAN</b>
671	Listrik
671.1	Kelistrikan
671.11	Perijinan
671.12	Rekomendasi
671.13	Pembinaan dan Pengawasan
671.11	Kelistrikan PLN
671.12	Kelistrikan non PLN
671.2	Pembangkit tenaga listrik
671.3	Transmisi tenaga listrik
671.31	Gardu Induk/gardu penghubung/gardu trafo

671.32	Saluran Udara Tenaga Listrik
671.33	Kabel Bawah Tanah
671.4	Distribusi Tenaga Listrik
671.41	Gardu Distribusi
671.42	Tegangan Menengah
671.43	Tegangan Rendah
671.44	Jaringan Bawah Tanah
671.5	Pengusahaan Listrik
671.51	Sambungan Listrik
671.52	Penjualan Tenaga Listrik
671.53	Tarif listrik
672	Tenaga Gas
673	Tenaga Matahari
674	Tenaga lainnya
<b>680</b>	<b>PERALATAN PEKERJAAN UMUM</b>
<b>690</b>	<b>AIR MINUM</b>
691	Intako
691.1	Bromcaptering
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (screen)
691.5	Pintu air
691.6	Saluran pembawa
691.7	Alat ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi air baku
692.1	Perpipaan
692.2	Katup Udara (Air Rolief)
692.3	Tutup penguras (Blow oof)
692.4	Bak pelepas tekanan
692.5	Jembatan pipa
692.6	Syphon
693	Instalasi pengelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh bahan kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	Clear Hell
694	Distribusi
694.1	Reservoir menara bawah tanah
694.11	Menara
694.12	Reservoir menara bawah tanah
694.2	Perpipaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan pipa
694.5	Syphon
694.6	Hydran
694.7	Katup
694.8	Bak pelepas tekanan (pressuer reducing valve)
<b>700</b>	<b>PENGAWASAN</b>
700.1	Kebijakan dan program pengawasan
700.2	Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek
701	Pengawasan Inventarisasi Asset
702	Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
703	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen

704	Pengawasan Penelitian/Riset
705	Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi
706	Pengawasan Pertanahan/BPN
<b>710</b>	<b>BIDANG PEMERINTAHAN</b>
711	Pengawasan Pemerintahan Provinsi
712	Pengawasan Pemerintah Daerah Kota
713	Pengawasan Pemerintahan Kelurahan
<b>720</b>	<b>BIDANG POLITIK</b>
721	Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll
722	Pengawasan pembinaan ipoleksosbud hankam
723	Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan kepemudaan
724	Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME.
<b>730</b>	<b>BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN</b>
731	Pengawasan Kesbangpolinmas
732	Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR
<b>740</b>	<b>BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
741	Pengawasan Pembangunan
742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
743	Pengawasan Kebudayaan
744	Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat
745	Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
746	Pengawasan Kesejahteraan Sosial
747	Pengawasan Kependudukan Migrasi/Urbanisasi
748	Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran
749	Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat
<b>750</b>	<b>BIDANG PEREKONOMIAN</b>
751	Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian
752	Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
753	Pengawasan Kehutanan
754	Pengawasan Pertambangan/ESDM
755	Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan
756	Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian
757	Pengawasan PMDN/PMA
758	Pengawasan Perbankan/Moneter
759	Pengawasan Perikanan
<b>760</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>
761	Pengawasan Pengairan
762	Pengawasan Jalan
763	Pengawasan Jembatan
764	Pengawasan Bangunan
765	Pengawasan Tata Ruang Kota
766	Pengawasan Tata Lingkungan
767	Pengawasan Ketenagaan
768	Pengawasan Air Minum
<b>770</b>	<b>PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK</b>
771	Penyimpangan Pejabat Publik
<b>780</b>	<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>
781	Pengawasan Pengadaan PNS
782	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
783	Keanggotaan PNS dalam Parpol
784	Penyimpangan pejabat/PNS
785	Persengketaan PNS
<b>790</b>	<b>BIDANG KEUANGAN</b>
791	Pengawasan Anggaran
792	Pengawasan Akuntansi
793	Pengawasan Perbendaharaan
794	Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah

795	Pengawasan Pendapatan
<b>800</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b> Termasuk klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian
800.1	Perencanaan
800.2	Penelitian
800.3	Statistik
<b>810</b>	<b>PENGADAAN</b> Meliputi Lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai.
811	Pendaftaran CPNS, PPPK
811.1	Testing
811.2	Screening
811.3	Pengumuman tes dan Pemanggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan CPNS
<b>820</b>	<b>MUTASI</b>
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
821.2	Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
821.3	Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
822	Kenaikan Gaji Berkala
823	Kenaikan Pangkat
824	Pemindahan / Pelimpahan / Pembantuan
825	Datasering dan Penempatan Kembali
827	Wajib Militer
<b>830</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
831	Peninjauan Masa Kerja
832	Penyesuaian Perangkat / Gaji
833	Penyesuaian Ijasah (pencantuman gelar)
834	Penghargaan lainnya
<b>840</b>	<b>KESEJAHTERAAN PEGAWAI</b>
841	Tunjangan
842	D a n a
842.1	Taspen
842.2	Askes, Bantuan kesehatan
842.3	Bantuan Pendidikan
843	Perawatan Kesehatan
845	Perumahan PNS
846	Dispensasi
<b>850</b>	<b>C U T I</b>
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Bersalin
855	Cuti karena Alasan penting
856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
<b>860</b>	<b>PENILAIAN</b>
861	Penghargaan
862	Hukuman
862.1	Ringan
862.2	Sedang
862.3	Berat
863	Konduite/ DP3
864	Ujian Dinas
865	Penilaian Kinerja
866	Rehabilitasi
<b>870</b>	<b>TATA USAHA KEPEGAWAIAN</b>
871	Formasi

872	Bezetting/ Daftar Urut Kepegawaian
873	Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legitimasi/Tanda pengenal
873.4	Daftar keluarga
873.5	KARSU/KARIS
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
874.1	Tanggal Lahir
874.2	Penggantian Nama
875	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
875.1	Pelimpahan wewenangan
875.2	Spesimen Tanda Tangan
876	Korps Kepegawaian
<b>880</b>	<b>PEMBERHENTIAN</b>
881	Atas Permintaan Sendiri termasuk pengunduran diri
882	Dengan Hak Pensiun
882.1	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. I
882.2	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. II
882.3	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. III
882.4	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol. IV
882.5	Pensiun Janda/Duda
882.6	Pensiun Yatim Piatu
882.7	Uang muka Pensiun
883	Karena Meninggal
884	Alasan lain, diantaranya keuzuran jasmani
885	Tidak dengan Hormat
886	Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas
887	Tali Asih Pensiun
<b>890</b>	<b>PENDIDIKAN PEGAWAI</b>
890.1	Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat
891	Pendidikan Prajabatan
892	Pendidikan Dalam Jabatan
892.1	Diklatpim
892.2	Diklat Teknis
892.3	Diklat Fungsional
893	Kursus-kursus, Penataran, Bimbingan Teknis
894	Pengembangan Pegawai
894.1	Tugas Belajar
894.2	Ijin Belajar
894.3	Tunjangan Belajar
894.4	Bantuan Pendidikan
894.5	Penempatan Kembali
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah, Symposium
895.3	Diskusi
895.4	Kuliah Lapangan/OL, Widya Wisata, KKN
895.5	Kurikulum
895.6	Karya Tulis
896	Tenaga Pengajar, Narasumber
897	Administrasi Pendidikan
898	Fasilitas Pendidikan
899	Sarana Pendidikan
<b>900</b>	<b>KEUANGAN</b>
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD

<b>910</b>	<b>ANGGARAN</b>
911	Keputusan ttg penunjukan pengelola keuangan Perangkat Daerah
912	Keputusan Gubernur/Wali Kota ttg penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD
913	DPA/DPPA/DPAL-SKPD/PPKD
914	Anggaran kas
915	Surat Penyediaan Dana (SPD)
<b>920</b>	<b>AKUNTANSI</b>
921	Laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
<b>930</b>	<b>PERBENDAHARAAN</b>
931	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
932	Surat Penolakan Penerbitan SP2D
933	Daftar Penguji SP2D
<b>940</b>	<b>PEMBINAAN KEBENDAHARAAN</b>
941	Bintek-bintek/kursus yang berkaitan dengan keuangan
<b>950</b>	<b>PENGELOLAAN KAS DAERAH</b>
951	Laporan pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari gaji
952	Laporan rekapitulasi penerimaan daerah
953	Daftar pemotongan dan penyeteroran pajak (PPN/PPh) dari CV/PT/instansi
954	Surat tanda setoran (STS)
955	Laporan Realisasi Daerah
955.1	Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
955.2	Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
956	Rekonsiliasi
956.1	Surat Rekonsiliasi Penerimaan
956.2	Laporan Rekonsiliasi Bank
957	Laporan Mutasi Penempatan Deposito
958	Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)
<b>960</b>	<b>EVALUASI DAN PENGENDALIAN</b>
961	Tuntutan Ganti Rugi
962	Tuntutan Perbendaharaan
963	Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota
964	Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
965	Edaran-edaran
<b>970</b>	<b>PENDAPATAN</b>
971	Perimbangan Keuangan
971.1	Bagi Hasil Pajak
971.11	Pajak Bumi Bangunan (PBB)
971.12	Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB)
971.13	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21)
971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
971.21	Sumber Daya Alam
972	Subsidi
973	Pajak
973.1	Pajak Kendaraan Bermotor
973.2	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
973.3	Pajak Pengembalian & Pemanfaatan Air Permukaan
973.4	Pajak Reklame
974	Retribusi
974.1	Retribusi bidang kesehatan
974.2	Retribusi bidang seni budaya dan pariwisata
974.3	Retribusi bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan (termasuk pasar)
974.4	Retribusi bidang pertanian dan peternakan (termasuk pemotongan hewan)
974.5	Retribusi bidang perhubungan, komunikasi informasi dan teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan,telekomunikasi, parkir dll)
974.6	Retribusi bidang perkebunan dan kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll)
974.7	Retribusi bidang perikanan dan kelautan



974.8	Retribusi bidang pertambangan, pemanfaatan air permukaan dan metrologi
974.9	Retribusi bidang lainnya (termasuk sampah)
975	Bea
975.1	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan Menteri
978.3	Bantuan Gubernur
978.4	Bantuan Walikota
978.5	Bantuan lainnya
979	Pendapatan Lainnya
979.1	Hasil Penjualan asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
979.11	Pelepasan Hak Atas Tanah
979.12	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
979.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2
979.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4
979.15	Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris
979.16	Penjualan Drum Bekas
979.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
979.2	Penerimaan Jasa Giro
979.21	Jasa Giro kas Daerah
979.22	Jasa Giro Pemegang Kas
979.23	Jasa Giro Khusus
979.3	Penerimaan Bunga Bank
979.31	Bunga Deposito
979.32	Bunga Tabungan
979.4	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)
979.41	Sumbangan Pihak Ke Tiga
979.42	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)
979.43	Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
979.5	Penerimaan lain-lain
979.51	Penerimaan kembali kredit BKK
979.52	Ternak tidak layak bibit
979.53	Sewa Internet
979.54	Penerimaan Dari Dana Bergulir/Revolving
979.55	Kerjasama Dengan BUMIDA
979.56	Penerimaan DUKS
979.57	Tempat Rekreasi Nusakambangan
979.58	Setoran TP-TGR
979.59	Penerimaan Lainnya dari Setda/SKPD

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO